

PENDAMPINGAN PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN DI PUSKESMAS AMPELGADING KABUPATEN MALANG

Mariana Puspa Dewi ¹⁾, Mulyaningtyas ²⁾ Pipit Rosita A. ³⁾
Institut Teknologi Dan Bisnis Asia Malang ^{1), 2), 3)}
mariana@asia.ac.id ¹⁾

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini berupa pembuatan laporan keuangan pada Puskesmas Ampelgading Malang adalah sebuah inisiatif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lembaga kesehatan masyarakat. Melalui kegiatan ini, dilakukan pemahaman mendalam terhadap struktur dan proses pengelolaan keuangan Puskesmas Ampelgading Malang, serta penerapan standar akuntansi yang relevan. Metodologi yang digunakan meliputi survei, analisis dokumentasi, serta pelatihan bagi staf terkait. Hasilnya, tercipta laporan keuangan yang lebih terstruktur, akurat, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat. Diharapkan, kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Puskesmas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang disediakan.

Kata kunci: laporan keuangan, transparansi, akuntabilitas

ASSISTANCE IN PRODUCING FINANCIAL REPORTS AT AMPELGADING HEALTH CENTER, MALANG DISTRICT

Abstract

This community service in the form of preparing financial reports at the Ampelgading Malang Community Health Center is an initiative to increase transparency and accountability in financial management in public health institutions. Through this activity, an in-depth understanding of the structure and process of financial management of the Ampelgading Malang Community Health Center was carried out, as well as the application of relevant accounting standards. The methodology used includes surveys, documentation analysis, and training for related staff. As a result, financial reports are created that are more structured, accurate and easy to understand for stakeholders, including the local community. It is hoped that this activity can make a positive contribution in increasing the efficiency and effectiveness of Puskesmas financial management, as well as strengthening public trust in the health services provided.

Keywords: *financial reports, transparency, accountability*

A. PENDAHULUAN

Puskesmas Ampelgading Malang menghadapi tantangan dalam pencatatan keuangan yang terstruktur dan transparan. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan akuntansi di antara staf administrasi dan manajerial menyebabkan kondisi keuangan yang kurang terkelola. Hal ini mempengaruhi akuntabilitas penggunaan dana publik dan meningkatkan risiko penyalahgunaan

dana. Sementara itu, tuntutan dari pemerintah atau pihak donor akan laporan keuangan yang akurat menambah urgensi untuk meningkatkan kemampuan pencatatan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang menyeluruh untuk staf terkait guna meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka dalam pencatatan keuangan, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan Puskesmas Ampelgading Malang.

Permasalahan yang dihadapi oleh Puskesmas dalam melakukan pencatatan keuangan antara lain:

1. Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan. Staf administrasi dan manajerial mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip akuntansi dan prosedur pencatatan keuangan yang benar. Kurangnya pelatihan atau pendidikan formal dalam bidang ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam mencatat transaksi keuangan dengan benar.
2. Kurangnya Sistem dan Prosedur yang Tertata. Puskesmas tidak memiliki sistem pencatatan keuangan yang terstruktur atau prosedur yang jelas terkait dengan pengelolaan keuangan. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksempurnaan dalam pencatatan, pelaporan yang tidak konsisten, atau bahkan kehilangan data keuangan yang penting.
3. Keterbatasan Sumber Daya. Keterbatasan sumber daya seperti personel, waktu, dan anggaran mungkin membuat sulit untuk mengalokasikan waktu yang cukup untuk melakukan pencatatan keuangan secara teratur dan akurat. Ini dapat mengarah pada kelalaian dalam pencatatan atau prioritas yang salah dalam alokasi sumber daya.
4. Tekanan Kinerja. Kondisi bekerja di Puskesmas mungkin membutuhkan fokus yang lebih besar pada pelayanan langsung kepada pasien, menyebabkan pencatatan keuangan dianggap sebagai tugas tambahan yang kurang mendapat perhatian prioritas.

Dengan pelatihan mengenai pencatatan keuangan yang baik dan kompleks bagi organisasi kesehatan yang kami lakukan maka Puskesmas dapat meningkatkan kualitas pencatatan keuangannya, yang pada gilirannya akan mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana yang dimiliki.

Peran Puskesmas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memungkinkan untuk memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pendapatan maupun pengeluarannya. Setelah menjadi BLUD (PPK-BLUD), memungkinkan Puskesmas untuk menggunakan pendapatan negara bukan pajak (PNPB) yaitu pendapatan dari layanan pasien secara langsung, tanpa harus disetor dahulu ke kas negara. Namun sebagai konsekuensi dari bentuk BLUD, pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk pelaporan menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil akhir dari proses akuntansi selama periode tertentu yang merupakan hasil pengumpulan data keuangan yang dapat digunakan sebagai alat bantu bagi para pemakai di dalam menilai kinerja keuangan pemerintahan daerah sehingga dapat

mengambil keputusan dengan tepat. Sebagai PPK-BLUD, Puskesmas harus menyusun laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Laporan keuangan yang harus disajikan adalah; 1) Neraca, 2) Laporan Operasional (LO), dan 3) Laporan Arus Kas (LAK). Implementasi proses akuntansi (jurnal hingga laporan) tentunya haruslah tetap konsisten, sehingga laporan yang dihasilkan benar-benar "AUDITABLE". Sebagai SKPD, Puskesmas juga dituntut untuk menyajikan laporan keuangan mengacu pada PERMENDAGRI 64 tahun 2013, seperti; 1) Neraca, 2) Laporan Operasional (LO), 3) Laporan Arus Kas (LAK), dan 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Entitas BLUD juga memiliki kewenangan pengelolaan kas secara mandiri dengan menyimpan maupun melakukan investas jangka pendek dengan memanfaatkan kas yang ada. Kedua hal ini mempunyai dampak terhadap transaksi keuangan dan akuntansi BLUD yang pada akhirnya tercermin dalam Laporan Keuangan BLUD.

Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 menerangkan tujuan laporan keuangan BLUD puskesmas untuk menyediakan informasi tentang penerimaan atau pendapatan puskesmas, informasi tentang total belanja BLUD pada satu periode, investasi, kas BLUD, pendanaan / pembiayaan dan laporan kinerja yang dicapai puskesmas BLUD. Sedangkan PP Nomor 71 tahun 2010 menjelaskan Penyajian laporan keuangan berupa data dan informasi yang mencakup:

a) Relevan jika mengambil keputusan dengan informasi kejadian pada masa lalu dan masa kini dan dimonitoring hasil evaluasinya; b) Andal ialah menyajikan fakta dengan jujur dan dapat diverifikasi; c) Dapat dibandingkan yaitu laporan keuangan yang memuat informasi yang dapat dibandingkan dengan periode masa lalu maupun entitas yang lain; d) Dapat dipahami bila pengguna memahami informasi yang disajikan laporan keuangan.

Pemerintah terus melakukan upaya penting dengan melakukan transparasi dan kauntabilitas di semua bidang khususnya di bidang kesehatan dengan mewujudkan good governance dan clear governance. Profesional, tanggungjawab, transparansi dan dapat diterima merupakan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan good governance. Sedangkan clear governance adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah secara menyeluruh dan terbuka tentang informasi keuangan.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil akhir dari proses akuntansi selama periode tertentu yang merupakan hasil pengumpulan data keuangan yang dapat digunakan sebagai alat bantu bagi para pemakai di dalam menilai kinerja keuangan pemerintahan daerah sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat. Begitu eratnya hubungan antara keterkaitan keuangan pemerintahan dan akuntansi pemerintahan, maka sistem dan proses yang lama dalam akuntansi pemerintahan banyak menimbulkan bermacam-macam kendala sehingga sepenuhnya mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan (Simanjuntak, 2008). Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual

menghasilkan perubahan yang cukup besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, penerapan akuntansi berbasis akrual dimaksudkan dapat memperbaiki kualitas dalam penyajian laporan keuangan pemerintah dan menyajikan data yang lebih akurat dalam menilai kinerja pemerintah.

Pada tahun 2010, pemerintah mencanangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggung jawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang begitu sangat terlihat dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah mewajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (accrual) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang awalnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual). Penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa penerapan SAP Berbasis Akrual dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dimana dari penerapan sistem SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan sistem SAP Berbasis Akrual.

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah, yaitu dengan membangun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan dalam operasional kegiatan dengan efektif dan efisien kepada masyarakat sebagai usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pengelolaan asal daya dilaksanakan oleh puskesmas untuk kemandirian dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Memberikan pelayanan kepada masyarakat diterapkan system pada UPTD atau badan daerah yang fleksibel dengan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Penerapan praktek bisnis dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk kesejahteraan dan kecerdasan pada kehidupan berbangsa dengan keleluasaan pengelolaan keuangan di puskesmas. Pendayagunaan dana pendapatan dikelola dengan baik untuk penyelenggaraan pelayanan 2 publik yang stabil. Penyajian laporan keuangan mencakup data dan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban di bidang keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

Laporan keuangan terutama diperlukan untuk mengetahui suatu nilai pada sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu dalam penentuan ketaatannya terhadap peraturan perundang - undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010) tentang Standar Akuntansi pemerintah Dalam pelaporan keuangan, sudah merupakan kewajiban setiap perusahaan untuk membuat dan melaporkan keuangan perusahaannya pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan yang memperlihatkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini.

Laporan keuangan puskesmas disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan sebagai dasar dalam membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan puskesmas periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, serta memberikan informasi realisasi pendapatan fungsional puskesmas.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi puskesmas yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai upaya puskesmas dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan puskesmas mengenai kenaikan atau penurunan neraca, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

B. METODE PELAKSANAAN

Salah satu puskesmas yang terletak di kabupaten Malang adalah Puskesmas Ampelgading yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan klinis, pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan tata usaha. Dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut, Puskesmas Ampelgading berpedoman pada peraturan (Menteri, 2003) nomor 63/KEP/M. PAN/7/2003 mengenai sepuluh prinsip pelayanan prima yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kenyamanan serta kedisiplinan, kesopanan dan keramahan.

Metoda pembelajaran yang diterapkan adalah metoda partisipatif. Dengan metoda ini, materi yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran orang dewasa (andragogi) sesuai golden rule 10-60-30, yaitu 10% (pengantar pelatihan/ introduction), 60% (praktik/aktivitas) dan 30% (pemberian teori secara menyeluruh).

Puskesmas Ampelgading juga telah menyediakan papan informasi yang berisi prosedur pelayanan, sehingga masyarakat dapat membaca alur untuk mendapatkan pelayanan. Namun, masih ada beberapa pasien yang enggan membaca prosedur tersebut, dan lebih memilih bertanya kepada petugas sehingga petugas pendaftaran harus menjelaskan secara langsung dan tentu saja

hal tersebut mengurangi efisiensi pelayanan. Tersedianya teknologi informasi modern, WIFI dan jaringan komputer di setiap unit mengakibatkan optimalnya pelayanan sehingga proses pelayanan dapat terintegrasi dengan baik. Kesadaran seluruh staf dan pimpinan dalam hal kedisiplinan sangat baik, sehingga jumlah masyarakat yang dapat dilayani sesuai dengan prosedur. Secara umum, masyarakat menilai kualitas pelayanan di Puskesmas Ampelgading cukup baik, dan kebanyakan dari mereka sembuh setelah berobat.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Program Pengabdian yang Diusulkan

1. Kegiatan dan Pelaksanaan

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan secara mandiri oleh Tim Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang dengan tema “Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan Di Puskesmas Ampelgading Kabupaten Malang”. Dengan pemateri sbb :

Tabel 1. Daftar Pemateri Pengabdian Masyarakat

Sesi.	Tahapan kegiatan	Pemateri
Sesi I	Prosedur Pencatatan Keuangan	Bu Mulyaningtyas & Pipit Rosita
Sesi II	Penggunaan Perangkat Lunak	Bu Mariana Puspa D
Sesi III	Diskusi & Sharing Session	Bu Mariana & Mulyaningtyas

2. Waktu dan Tempat Pengabdian kepada masyarakat

Pelaksanaan kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan bertempat di Puskesmas Ampelgading, Kabupaten Malang, Hari Rabu 12 Juni 2024 dari jam 09.00-16.00.

3. Mitra/Subjek Pengabdian

Workshop diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri dari Kepala Puskesmas Ampelgading dan seluruh Staf. Suasana berlangsung tertib, komunikasi berlangsung dua arah, peserta antusias utamanya di sesi diskusi dan sharing.

4. Prosedur

Dalam Pengabdian Masyarakat ini, lebih diutamakan adanya komunikasi dua arah dan diskusi atau pemecahan kasus mengenai hal apa saja yang bisa dijadikan pendampingan pembuatan laporan keuangan di Puskesmas Ampelgading. Diskusi dan sharing session berlangsung dengan baik, dan diakhiri dengan kegiatan implementasi Pelayanan Prima yang akan di monitoring dan evaluasi dalam 3 bulan ke depan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat berupa :

1. Peningkatan Kapasitas SDM:
 - a) Peserta pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam pencatatan keuangan.
 - b) Puskesmas memiliki staf yang lebih kompeten dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
2. Penerapan Sistem Pencatatan Keuangan yang Lebih Baik:
 - a) Implementasi sistem pencatatan keuangan yang lebih terstruktur dan sesuai standar.
 - b) Laporan keuangan menjadi lebih tepat waktu dan akurat, memudahkan pengambilan keputusan.
3. Transparansi dan Akuntabilitas:
 - a) Peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana puskesmas.
 - b) Akuntabilitas terhadap penggunaan dana publik meningkat, mengurangi potensi penyalahgunaan.

Pelatihan Lanjutan dan Pendampingan meliputi: Menyediakan pelatihan lanjutan secara periodik untuk terus meningkatkan kompetensi staf, Melakukan pendampingan dan mentoring oleh ahli keuangan untuk memastikan penerapan yang konsisten. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas sistem pencatatan keuangan. Monitoring rutin untuk memastikan bahwa standar keuangan tetap dipatuhi dan ada perbaikan berkelanjutan. Dengan hasil yang positif dan program keberlanjutan yang direncanakan dengan baik, pelatihan pencatatan keuangan di puskesmas dapat memberikan dampak jangka panjang yang signifikan dalam meningkatkan manajemen keuangan dan pelayanan kesehatan di masyarakat.

Hasil yang diperoleh adalah kemampuan peserta dalam pelayanan publik yang sering dijumpai yaitu : a. Proses pelayanan dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan yang standar. b. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang diperlukan. c. Pelaksanaan pelayanan didukung teknologi sarana dan prasarana yang memadai. d. Pelayanan dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan kode etik. e. Pelaksanaan layanan dapat memuaskan.

D. SIMPULAN

Pelatihan pencatatan keuangan di puskesmas berhasil meningkatkan kompetensi staf, mengimplementasikan sistem pencatatan yang lebih terstruktur, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta kepuasan masyarakat, dengan program keberlanjutan meliputi pelatihan lanjutan, evaluasi berkala, pengembangan sistem informasi, pembentukan tim audit internal, sosialisasi, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi dengan institusi pendidikan untuk memastikan dampak positif jangka panjang.

Pelatihan pendampingan pembuatan laporan keuangan memiliki banyak manfaat, terutama bagi Puskesmas Ampelgading Kabupaten Malang. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari pelatihan ini:

1. Meningkatkan Pemahaman Akuntansi.
Membantu peserta memahami konsep dasar akuntansi dan pentingnya laporan keuangan dalam pengambilan keputusan bisnis.
2. Kepatuhan terhadap Regulasi.
Memastikan bahwa laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku, sehingga menghindari masalah hukum atau pajak di kemudian hari.
3. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik.
Memberikan informasi yang akurat dan relevan untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan strategis.
4. Transparansi dan Akuntabilitas.
Meningkatkan transparansi keuangan dan akuntabilitas dalam organisasi, yang penting untuk membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan mitra bisnis.
5. Efisiensi Operasional.
Membantu dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan efisiensi, sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan.
6. Pengelolaan Keuangan yang Lebih Baik.
Memfasilitasi pengelolaan kas dan sumber daya keuangan dengan lebih efektif, yang penting untuk menjaga kesehatan keuangan organisasi.
7. Persiapan untuk Pendanaan.
Memudahkan proses penyusunan laporan keuangan yang diperlukan untuk mengajukan pembiayaan atau investasi dari pihak ketiga, seperti bank atau investor.
8. Perencanaan Pajak yang Lebih Baik.
Membantu dalam perencanaan pajak yang lebih baik dengan menyusun laporan keuangan yang sesuai dan memahami implikasi pajak dari berbagai transaksi bisnis.
9. Pelaporan yang Lebih Cepat dan Akurat.

Meningkatkan kemampuan untuk menyusun laporan keuangan dengan cepat dan akurat, yang penting untuk analisis bisnis dan laporan periodik.

10. Peningkatan Kepercayaan Diri.

Meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam mengelola dan melaporkan keuangan, yang penting untuk keberhasilan jangka panjang.

Pelatihan ini biasanya mencakup berbagai topik, termasuk dasar-dasar akuntansi, teknik pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan (seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas), serta analisis laporan keuangan. Dengan demikian, peserta dapat memperoleh keterampilan praktis yang langsung dapat diterapkan.

E. SARAN

1. Kegiatan ini dapat dilangsungkan pada institusi lain khususnya organisasi nirlaba yang minim pengetahuan mengenai pencatatan keuangan sederhana.
2. Dapat dilakukan pengabdian lebih lanjut dengan materi lanjutan atau materi berbeda.
3. Pelatihan ini membantu Puskesmas dalam mencatat dan melaporkan transaksi keuangan secara akurat dan transparan. Ini penting untuk memastikan bahwa semua dana yang diterima dan dikeluarkan tercatat dengan jelas.
4. Dengan pelatihan yang tepat, staf Puskesmas dapat mengelola anggaran dengan lebih baik. Mereka dapat merencanakan dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, sehingga mengurangi pemborosan dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan kebutuhan prioritas.
5. Pencatatan keuangan yang baik meningkatkan akuntabilitas Puskesmas terhadap masyarakat dan pemerintah. Ini membantu dalam memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan bertanggung jawab.
6. Data keuangan yang akurat memungkinkan manajemen Puskesmas membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan sumber daya, perencanaan program, dan pengembangan fasilitas.
7. Sistem pencatatan yang terstruktur dan terlatih membantu mencegah kecurangan dan penyalahgunaan dana. Dengan adanya kontrol internal yang baik, risiko terjadinya korupsi dapat diminimalkan.
8. Dengan pencatatan yang baik, Puskesmas dapat memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan mereka secara berkala. Ini memungkinkan identifikasi area yang memerlukan perbaikan dan membantu dalam merencanakan strategi perbaikan.

Secara keseluruhan, pelatihan pencatatan keuangan di Puskesmas adalah investasi penting untuk meningkatkan manajemen keuangan, efisiensi operasional, dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Binsar, H. & Simanjuntak (2008). Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintah Di Indonesia.
- Mu'am, A. (2011). Basis Akruall dalam Akuntansi Pemerintah Indonesia : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Tangerang Selatan: Mifas Rasam Publishing.
- Menteri, P. (2003). Peraturan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003
- Pasolong. (2007). Kualitas Pelayanan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.